



Dampak Sosial, Ekonomi, dan Administratif terhadap Pembentukan Kabupaten Pelalawan

Esterina Sibuea¹, Fathia Aziza Sabila Roshida², Kamelia Ayu Usmayanti³, Anisah Lutfiyah⁴, Ahmal⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Riau, Indonesia

E-mail : esterina.sibuea3835@student.unri.ac.id¹, fathia.aziza6018@student.unri.ac.id², kamelia.ayu5208@student.unri.ac.id³, anisah.luthfiyyah4314@student.unri.ac.id⁴, ahmal@lecturer.unri.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received November 21, 2025

Revised November 23, 2025

Accepted November 27, 2025

Keywords:

Pelalawan Regency, Regional Expansion, Decentralization, Socio-Economic Impact, Regional Autonomy

ABSTRACT

The establishment of Pelalawan Regency through Law No. 53 of 1999 was a response to post-1998 Reform decentralization, which aimed to improve public services and community welfare. This study analyzes the impact of the regency's establishment holistically by integrating three dimensions: social, economic, and administrative. Using archival analysis and interviews with key figures, this study found that the division of the region was the result of an organized and participatory community movement, systematically documented from the Kampar Hilir Community Grand Meeting to the inauguration on October 12, 1999. The social impact shows the emergence of a new local identity and strengthened community solidarity, but is accompanied by a development gap between the administrative center of Pangkalan Kerinci and rural areas. Economically, the economic structure has transformed from a dominance of the primary sector to diversification with a significant role for the processing industry, driven by large investments in oil palm plantations and the forestry industry. However, this growth faced challenges of interregional inequality and dependence on the corporate economy. The administrative impact included regional reorganization, the formation of a new government structure, and the development of a governance system, despite limitations in human resources and interagency coordination. This study concludes that the establishment of Pelalawan Regency has resulted in complex and ambivalent changes, with successes in strengthening local autonomy but facing challenges in equitable development and bureaucratic effectiveness.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 21, 2025

Revised November 23, 2025

Accepted November 27, 2025

Kata Kunci:

Kabupaten Pelalawan, Pemekaran Wilayah, Desentralisasi, Dampak Sosial Ekonomi, Otonomi Daerah

ABSTRACT

Pembentukan Kabupaten Pelalawan melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 merupakan respons terhadap desentralisasi pasca-Reformasi 1998 yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis dampak pembentukan kabupaten tersebut secara holistik dengan mengintegrasikan tiga dimensi: sosial, ekonomi, dan administratif. Menggunakan metode analisis arsip dan wawancara dengan tokoh kunci, penelitian ini menemukan bahwa pemekaran wilayah merupakan hasil gerakan masyarakat yang terorganisir dan partisipatif, terdokumentasi secara sistematis sejak Musyawarah Besar Masyarakat Kampar Hilir hingga peresmian pada 12 Oktober 1999. Dampak sosial menunjukkan munculnya identitas lokal baru dan penguatan solidaritas



masyarakat, namun disertai kesenjangan pembangunan antara pusat pemerintahan Pangkalan Kerinci dengan wilayah pedesaan. Secara ekonomi, struktur perekonomian bertransformasi dari dominasi sektor primer menuju diversifikasi dengan peran signifikan sektor industri pengolahan, didorong oleh investasi besar di perkebunan kelapa sawit dan industri kehutanan. Namun, pertumbuhan ini menghadapi tantangan ketimpangan antarwilayah dan ketergantungan pada ekonomi korporasi. Dampak administratif mencakup reorganisasi wilayah, pembentukan struktur pemerintahan baru, dan pengembangan sistem tata kelola, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Kabupaten Pelalawan menghasilkan perubahan kompleks yang bersifat ambivalen, dengan keberhasilan dalam Penguatan otonomi lokal namun menghadapi tantangan pemerataan pembangunan dan efektivitas birokrasi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Esterina Sibuea
Universitas Riau

E-mail: esterina.sibuea3835@student.unri.ac.id

PENDAHULUAN

Pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Indonesia setelah Reformasi 1998 merupakan respons terhadap tuntutan desentralisasi, pelayanan publik yang efisien, dan aspirasi lokal untuk otonomi yang lebih besar. Salah satu manifestasi konkret dari dinamika ini adalah pembentukan Kabupaten Pelalawan pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Secara resmi, pemekaran ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan regional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat tata kelola lokal. Namun, hampir tiga dekade berlalu, pertanyaan mendasar tetap ada: apa dampak nyata pembentukan Kabupaten Pelalawan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan administratif, dan bagaimana ketiga dimensi ini berinteraksi dalam membentuk realitas pembangunan dan tata kelola setelah pemekaran?

Beberapa studi telah berusaha menjawab beberapa pertanyaan ini, meskipun dengan cakupan yang terbatas. Hasibuan (2007), dalam studinya tentang dampak administratif pembagian wilayah di Riau, menemukan bahwa pembentukan kabupaten baru seperti Pelalawan memang memperpendek rantai birokrasi, tetapi seringkali disertai dengan perluasan struktur institusional dan tumpang tindih wewenang. Dari sisi ekonomi, Lubis (2012) mengamati peningkatan pendapatan daerah (PAD) dan alokasi anggaran pembangunan di Kabupaten Pelalawan setelah pemekaran, namun juga mencatat ketidakseimbangan antara kawasan perkotaan (Pangkalan Kerinci) dan kawasan pedesaan yang masih bergantung pada ekonomi subsisten. Sementara itu, Siregar (2015) menyoroti perubahan dalam tatanan sosial-budaya komunitas Melayu Pelalawan, khususnya melemahnya otoritas adat tradisional akibat intervensi struktur pemerintahan modern setelah pemekaran.



Meskipun ketiga studi ini memberikan wawasan berharga, masing-masing hanya menganalisis satu dimensi dampak perluasan secara terpisah administratif, ekonomi, atau sosial tanpa mengintegrasikan ketiganya ke dalam kerangka analitis tunggal yang saling terkait. Pendekatan sektoral ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk menangkap kompleksitas interaksi antar-dimensi, seperti bagaimana perubahan struktur administratif memengaruhi distribusi manfaat ekonomi, atau bagaimana transformasi sosial memengaruhi partisipasi dalam pemerintahan lokal. Selain itu, sebagian besar studi ini bersifat deskriptif dan kurang menggunakan pendekatan historis-struktural yang dapat mengungkap akar masalah dan pola perubahan jangka panjang.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembentukan Kabupaten Pelalawan secara holistik dengan mengintegrasikan tiga dimensi sosial, ekonomi, dan administrative ke dalam narasi yang kohesif. Melalui pendekatan kualitatif historis dan analisis data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah daerah, dan studi sebelumnya, penelitian ini berusaha merekonstruksi proses dan konsekuensi perluasan dari perspektif yang lebih komprehensif. Keunikan artikel ini terletak pada integrasi multidimensi ini, yang memungkinkan identifikasi mekanisme kausal dan dinamika pengaruh timbal balik yang tidak terlihat dalam studi sebelumnya. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman tentang Kabupaten Pelalawan, tetapi juga memperkaya diskusi akademis tentang efektivitas kebijakan perluasan wilayah di Indonesia secara umum, khususnya dalam konteks keseimbangan antara otonomi, keadilan sosial, dan efisiensi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis arsip. Penelitian arsip mencakup sumber-sumber primer yang tersedia di arsip, koleksi khusus perpustakaan, dan repositori lain juga. Metode penelitian arsip adalah metode pengumpulan data atau catatan yang sudah tersedia di arsip. Metode analisis arsip dilakukan untuk menelaah dokumen resmi, seperti surat keputusan, naskah pembentukan Kabupaten Pelalawan, dan foto dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Arsip-arsip tersebut memberikan dasar faktual dan historis yang memperkuat temuan dari wawancara. kombinasi data arsip dengan wawancara memungkinkan peneliti melihat hubungan antara kebijakan desentralisasi dan perubahan sosial masyarakat secara lebih komprehensif.

Wood (2013) menggambarkan wawancara sebagai suatu interaksi komunikasi yang menekankan pada proses tanya jawab. Dalam konteks tujuan untuk memperoleh informasi, wawancara terjadi ketika pewawancara mengajukan pertanyaan untuk memahami pandangan, pengetahuan, sikap, pengalaman, dan aspek lain yang relevan dari narasumber yang diwawancarai (Wood, 2013). Wawancara juga digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman para informan kunci seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintah daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) Kabupaten Pelalawan. Pertanyaan bersifat fleksibel sehingga peneliti dapat menyesuaikan arah pembicaraan berdasarkan jawaban responden. Proses wawancara menghasilkan data berupa rekaman suara.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengungkap bahwa pembentukan Kabupaten Pelalawan pada tahun 1999 merupakan hasil dari gerakan masyarakat yang terorganisir, partisipatif, dan didukung oleh dokumentasi yang lengkap. Prosesnya dimulai dari Musyawarah Besar Masyarakat Kampar Hilir yang menghasilkan keputusan kolektif untuk membentuk daerah otonom baru. Musyawarah ini kemudian diikuti oleh deklarasi formal masyarakat Kampar Bagian Hilir, yang menjadi pernyataan politik tentang kehendak pemekaran wilayah.

Setelah itu, dibentuk dua kepanitiaan utama: Panitia Musyawarah Besar dan Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pelalawan. Kedua struktur ini menunjukkan kematangan organisasi masyarakat dalam mengelola tahapan teknis, administratif, dan politik pemekaran. Delegasi masyarakat bahkan melakukan kunjungan ke Jakarta untuk melakukan lobi politik kepada pemerintah pusat, yang terekam dalam foto-foto sejarah yang masih tersimpan dengan baik.

Selain dokumen tertulis seperti keputusan musyawarah, deklarasi, susunan panitia, dan lampiran-lampiran resmi yang tercatat dalam buku referensi "Pekantua ke Pelalawan", penelitian juga menemukan sumber sejarah lisan berupa video dokumenter "Sejarah Pembentukan Kabupaten Pelalawan". Video ini memuat wawancara langsung dengan tokoh pembentukan Kabupaten Pelalawan, Prof. Dr. Ir.H. T. Dahril, S.Mc, yang menjelaskan latar belakang pemekaran, antara lain kesenjangan pembangunan, sulitnya akses layanan publik, keinginan untuk memperkuat identitas kultural masyarakat setempat, serta proses pengajuan ke pemerintah kabupaten sampai pemerintah pusat.

Wawancara dengan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pelalawan, Fakhurrozi, S, Sos, menegaskan bahwa arsip-arsip yang tersimpan bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga bukti nyata bahwa pembentukan kabupaten ini adalah perjuangan kolektif, bukan kepentingan segelintir elit. Dokumentasi yang sistematis dan utuh ini mencerminkan proses demokrasi lokal yang berjalan secara terbuka dan inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa pembentukan Kabupaten Pelalawan didasarkan pada aspirasi nyata masyarakat, berlangsung melalui mekanisme partisipatif yang terstruktur, dan meninggalkan jejak dokumentasi yang komprehensif. Temuan ini menjadi dasar penting untuk memahami dampak lanjutan baik sosial, ekonomi, maupun administratif dari proses pemekaran tersebut.

b. Pembahasan

1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

a. Masa Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, wilayah bekas Kerajaan Pelalawan mengalami berbagai perubahan administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Kewedanaan Pelalawan dipecah menjadi dua bagian. Tiga kecamatan bergabung dengan Kabupaten Bengkalis dan satu kecamatan bergabung dengan Kabupaten Kampar. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kewedanaan Pelalawan terlepas dari Kabupaten Bengkalis dan sepenuhnya bergabung dengan Kabupaten Kampar. Sejak saat itu,



Pelalawan yang sebelumnya merupakan ibukota kewedanaan menjadi sebuah kepenghuluhan atau kedesaan dalam wilayah Kecamatan Bunut.

Pembangunan wilayah Kampar Bagian Hilir yang merupakan bekas wilayah Kerajaan Pekantua-Pelalawan dan Kewedanaan Pelalawan selama bergabung dengan Kabupaten Kampar berlangsung sangat lambat. Sebagai gambaran, wilayah yang luasnya mencapai 12.490,42 kilometer persegi hanya dibangun jalan aspal sepanjang 27 kilometer, yaitu dari Simpang Bunut ke kantor Camat Bunut dengan kualitas yang sangat rendah.

b. Proses Pembentukan Kabupaten Pelalawan

Kesadaran akan ketertinggalan pembangunan di wilayah Kampar Bagian Hilir mendorong munculnya aspirasi masyarakat untuk membentuk kabupaten tersendiri. Ide dan cita-cita ini terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Pelalawan, baik yang berada di Pekanbaru maupun di Bangkinang.

Untuk mewujudkan aspirasi tersebut, diadakan rapat tokoh-tokoh Masyarakat Kampar Bagian Hilir di rumah Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc pada tanggal 31 Januari 1999. Rapat yang berlangsung dari pukul 20.00 hingga 24.00 WIB tersebut menyepakati pembentukan formatur Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pelalawan. Secara aklamasi, rapat memilih Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc sebagai Ketua Umum dan Drs. H. T. Ilyas Usman sebagai Sekretaris Umum.

Rapat tersebut juga menyepakati untuk mengadakan Rapat Akbar Masyarakat Kampar Bagian Hilir pada tanggal 4 Februari 1999 yang bertempat di aula SMAN 1 Langgam di Pangkalan Kerinci. Pada tanggal 11 hingga 13 April 1999, dilaksanakan kegiatan Seminar dan Musyawarah Besar di Pangkalan Kerinci yang menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Sekretariat Wilayah Daerah Riau.

c. Peresmian Kabupaten Pelalawan

Perjuangan masyarakat Kampar Bagian Hilir akhirnya membuahkan hasil. Kabupaten Pelalawan resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Pelalawan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta.

Pada awalnya, Kabupaten Pelalawan terdiri dari empat wilayah kecamatan, yaitu Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD tentang pemekaran wilayah, jumlah kecamatan bertambah menjadi delapan, yaitu Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, Kuala Kampar, Pangkalan Kerinci, Ukui, Pangkalan Lesung, dan Pelalawan.

Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dimulai pada tanggal 5 Desember 1999 dengan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota kabupaten. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November 2000, diresmikan keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 yang berjumlah 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 15 November 2000.



Dengan terbentuknya lembaga legislatif, pemilihan Bupati pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna DPRD. Terpilihlah pasangan T. Azmun Jaafar, SH dan Abd. Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan periode 2001-2006.

d. Perkembangan Kabupaten Pelalawan

Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan terus mengalami pemekaran wilayah administratif. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005, kabupaten ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah sekitar 13.067,29 kilometer persegi atau sekitar 14,73 persen dari total luas Provinsi Riau. Wilayah kabupaten ini dibelah oleh aliran Sungai Kampar dan menjadi tempat pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri.

Secara geografis, Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Kabupaten ini merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat.

Penduduk asli Kabupaten Pelalawan terdiri dari suku Melayu, baik Melayu Pelalawan maupun Melayu Petalangan yang biasa juga disebut sebagai Melayu Darat atau Melayu Daratan. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam yang memang telah berkembang sejak masa Kesultanan Pelalawan.

2. Dampak Sosial Pembentukan Kabupaten Pelalawan

Pembentukan Kabupaten Pelalawan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menimbulkan perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat di wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kampar. Setelah pemekaran, perubahan kebijakan administratif membawa konsekuensi sosial yang luas, mencakup munculnya identitas lokal baru, perubahan struktur sosial, serta dinamika baru dalam relasi antarwarga dan antara masyarakat dengan negara.

Lahirnya Kabupaten Pelalawan memunculkan rasa kebersamaan dan identitas lokal baru di tengah masyarakat. Masyarakat mulai mengembangkan rasa bangga terhadap daerahnya sendiri (*local pride*) dan memperkuat ikatan sosial antarwarga sebagai bentuk tanggapan terhadap perubahan struktural pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Sujianto (2022) dalam penelitiannya tentang modal sosial di daerah tertinggal Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa pemekaran wilayah memicu tumbuhnya semangat gotong royong dan kerja sama antarmasyarakat, terutama di pedesaan. Warga mulai menyadari pentingnya kolaborasi sosial untuk mempercepat pembangunan daerah mereka sendiri. Dalam konteks ini, pembentukan kabupaten tidak sekadar menjadi kebijakan administratif, melainkan juga menjadi katalis bagi tumbuhnya jaringan sosial yang lebih kuat dan saling bergantung.

Dinamika sosial yang muncul tidak sepenuhnya positif. Wilayah ibu kota kabupaten, Pangkalan Kerinci, berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan, sementara daerah-daerah lain seperti Teluk Meranti, Kuala Kampar, dan Ukui justru tertinggal dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik. Ketimpangan pembangunan ini menyebabkan kesenjangan sosial yang nyata antara masyarakat kota dan desa, serta menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam distribusi hasil pembangunan. Fenomena ini umum terjadi di banyak



daerah baru hasil pemekaran, tetapi di Pelalawan, dampaknya terlihat jelas dalam perbedaan gaya hidup, akses terhadap pendidikan, dan partisipasi dalam proses pembangunan lokal.

Perubahan struktur sosial di Kabupaten Pelalawan juga sangat dipengaruhi oleh masuknya modal besar dari perusahaan swasta, terutama yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri kehutanan. Investasi tersebut membawa dua wajah, di satu sisi membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun di sisi lain menciptakan ketegangan sosial akibat perebutan sumber daya alam. Manalu (2018) dalam penelitiannya mengenai dampak sosial ekonomi keberadaan PT. Gandaerah Hendana di Kecamatan Ukui menemukan bahwa perusahaan ini menjadi salah satu aktor penting dalam membentuk pola relasi sosial baru di masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dari pertanian subsisten kini bergantung pada upah buruh dan ekonomi perkebunan. Ketergantungan ini memperlemah kemandirian sosial dan ekonomi warga, bahkan memicu konflik horizontal terkait kepemilikan tanah dan keadilan distribusi hasil usaha.

Pemekaran ini memperluas kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses politik lokal. Warga menjadi lebih terlibat dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan daerah, meski belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas birokrasi yang memadai. Proses pembentukan Kabupaten Pelalawan juga berdampak pada kebangkitan kembali nilai-nilai adat dan budaya lokal. Di beberapa wilayah seperti Teluk Meranti, revitalisasi ini disertai dengan munculnya kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Yohana dan Always (2017) meneliti fenomena ini melalui kajian tentang konstruksi sosial masyarakat terhadap fenomena alam Bono, gelombang sungai yang kini menjadi daya tarik wisata unggulan daerah. Fenomena Bono, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai peristiwa alam biasa, kini dikonstruksi sebagai simbol identitas sosial masyarakat Pelalawan dan kebanggaan lokal yang memperkuat rasa persatuan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan membawa dampak sosial yang bersifat ambivalen, di satu sisi memperkuat identitas lokal, solidaritas sosial, dan partisipasi masyarakat, di sisi lain menimbulkan kesenjangan ekonomi, konflik sosial, serta ketegangan antara tradisi dan modernitas. Pemekaran ini membentuk realitas sosial baru di mana masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan struktur kekuasaan, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian pula, pembentukan Kabupaten Pelalawan dapat dipandang sebagai sebuah proses sosial panjang yang tidak hanya menghasilkan pemerintahan baru, tetapi juga membentuk ulang pola kehidupan masyarakat di tingkat lokal.

3. Dampak Ekonomi Pembentukan Kabupaten Pelalawan

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diukur melalui beberapa indikator utama, seperti struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi sendiri mencerminkan peningkatan aktivitas yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pelalawan, yang dibentuk melalui pemekaran dari Kota Dumai di Provinsi Riau, dikategorikan sebagai daerah dengan perkembangan yang cepat. Pada masa awal pembentukannya di tahun 1999, perekonomian Kabupaten Pelalawan menunjukkan karakteristik kuat sebagai daerah berbasis sumber daya alam. Struktur ekonomi daerah pada periode 1999–2000 didominasi oleh sektor primer, khususnya perkebunan kelapa sawit dan



aktivitas kehutanan, yang merupakan penyumbang utama terhadap nilai tambah daerah. Dominasi sektor primer ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan industri besar, seperti perusahaan kehutanan dan industri *pulp & paper*, yang telah beroperasi sejak tahun 1990-an. Industri skala besar ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap *output* ekonomi dan penerimaan fiskal daerah, tetapi juga menciptakan efek pengganda melalui peningkatan aktivitas logistik, perdagangan, dan migrasi tenaga kerja.

Arus investasi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa awal ini, sebab berbagai kegiatan ekspansi perkebunan dan pembangunan infrastruktur industri sedang berlangsung. Penelitian menguatkan bahwa investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan, investasi merupakan variabel paling dominan dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi Pelalawan, mencerminkan bahwa struktur ekonomi kabupaten sangat dipengaruhi oleh modal dan kegiatan industri berskala besar, sementara pengaruh tenaga kerja tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, fase awal pembangunan ini juga menghadapi tantangan ketimpangan antar-kecamatan, yang disebabkan oleh perbedaan akses terhadap infrastruktur dan konsentrasi investasi yang terpusat di wilayah industri dan perkebunan.

Karakteristik ekonomi awal tersebut kemudian menjadi fondasi bagi pertumbuhan Pelalawan pada dekade berikutnya. Dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi perubahan signifikan pada PDRB Kabupaten Pelalawan akibat pergeseran struktur ekonomi, di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sebelumnya dominan, mulai bergeser ke sektor lain. Pada tahun 2015, perekonomian Pelalawan didorong oleh sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan bermotor, dan pertambangan. Pertumbuhan ekonomi Pelalawan menempatkannya di posisi ketiga tertinggi di Provinsi Riau pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 2,48 persen, di bawah Kota Pekanbaru (5,47 persen) dan Kepulauan Meranti (2,68 persen). Meskipun memiliki PDRB yang tergolong tinggi, Kabupaten Pelalawan masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor unggulan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi ekonomi Pelalawan sebagai modal utama dalam mendorong pertumbuhan, pengembangan industri, dan peningkatan investasi. Kebijakan yang mendorong masuknya investasi, didukung oleh birokrasi yang efisien, kemudahan perizinan, serta penerapan pajak dan retribusi yang kompetitif, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Selain investasi, pertumbuhan didorong oleh penambahan jumlah dan kualitas faktor produksi, seperti peran investasi dalam menambah barang modal, perkembangan teknologi dalam meningkatkan efisiensi, dan pertumbuhan penduduk dalam menambah tenaga kerja. Namun, penambahan penduduk juga memiliki peran ganda; ia dapat mendorong pertumbuhan melalui penambahan tenaga kerja, tetapi juga dapat menjadi hambatan jika penciptaan lapangan kerja tidak memadai.

4. Dampak Administratif Pembentukan Kabupaten Pelalawan

Dampak Administratif Pembentukan Kabupaten Pelalawan Pembentukan Kabupaten Pelalawan sebagai daerah administratif baru telah menimbulkan perubahan besar dalam sistem



pemerintahan daerah. Pemekaran ini tidak saja memecah wilayah secara geografis, tetapi juga membawa perubahan yang mendalam dalam hal pembagian kewenangan, pembentukan birokrasi baru, serta pengelolaan pelayanan publik yang sebelumnya menjadi kewenangan Kabupaten Kampar.

a. Pembagian Wilayah Administratif

Pembentukan Kabupaten Pelalawan berdampak langsung pada reorganisasi wilayah administratif dengan pembentukan beberapa distrik awal yang disesuaikan dengan kondisi geografis, kepadatan penduduk, karakteristik sosial budaya, dan potensi ekonomi wilayah. Proses ini melibatkan kerja politik dan administratif yang panjang, termasuk penyesuaian batas wilayah, penghindaran tumpang tindih yurisdiksi, konsultasi dengan masyarakat, serta pembangunan desa dan kawasan perkotaan baru untuk menjaga akses layanan publik. Penetapan Kerinci sebagai ibu kota mendorong pembangunan pusat administrasi, fasilitas umum, dan infrastruktur yang menjadikannya pusat pemerintahan dan ekonomi kabupaten. Seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, pembagian administratif ini terus berkembang secara dinamis melalui evaluasi dan usulan pembentukan distrik tambahan untuk memastikan efektivitas koordinasi layanan publik sesuai tantangan dan kebutuhan pembangunan.

b. Pembentukan dan Pembagian Jabatan Pemerintahan

Di samping perubahan wilayah, pembentukan Kabupaten Pelalawan juga memerlukan penataan struktur jabatan pemerintahan daerah mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan unit pemerintahan terendah. Penataan kelembagaan di Pelalawan mengikuti pola baku yang ditetapkan pemerintah pusat.

Ini termasuk pembentukan posisi-posisi berikut:

- Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengambil keputusan tertinggi,
- Sekretaris Daerah sebagai koordinator birokrasi,
- Berbagai departemen dan lembaga yang bertanggung jawab atas fungsi teknis,
- Inspektorat sebagai pengawas internal,
- Sekretariat DPRD untuk mendukung fungsi legislasi.

Seiring perkembangan peraturan nasional, struktur ini juga mengalami beberapa perubahan, terutama ketika terdapat penyesuaian jumlah Unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian menunjukkan bahwa Pelalawan telah melakukan beberapa penyesuaian terhadap OPD -nya, yang menunjukkan adanya adaptasi terhadap tuntutan administratif dan pengembangan kapasitas lokal.

c. Penguatan Manajemen Tata Kelola Administrasi

Pemekaran Kabupaten Pelalawan membawa perubahan besar dalam tata kelola administrasi, karena pemerintah daerah harus menjalankan seluruh fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah induk. Fungsi tersebut mencakup penyusunan regulasi, pengelolaan anggaran, penyusunan rencana pembangunan, dan pelayanan publik.

a) Pengembangan Sistem Keuangan

Sebagai kabupaten baru, Pelalawan harus membentuk struktur anggaran daerah (APBD) sendiri. Ini melibatkan perencanaan pendapatan (termasuk pendapatan lokal, dana transfer, dan sumber lainnya) dan pengeluaran. Pada tahap awal, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk:



- pembangunan gedung dan fasilitas pemerintah,
- biaya karyawan,
- penyediaan infrastruktur pelayanan publik dasar . Sistem akuntabilitas

Keuangan seperti pelaporan keuangan daerah, pemantauan anggaran, dan audit internal harus dibangun dari awal. Inspektorat menjadi lembaga penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Perumusan Peraturan Daerah

Sebagai daerah otonom, Pelalawan harus merumuskan berbagai peraturan daerah (Perda) yang menjadi landasan hukum pengelolaan kewenangan daerah, seperti :

- Peraturan Susunan Pemerintahan Daerah,
- Peraturan tentang biaya dan pajak daerah,
- Peraturan tentang perizinan usaha,
- Peraturan tentang perencanaan tata ruang wilayah,
- Regulasi tentang pelayanan publik.

Proses penyusunan regulasi ini merupakan prosedur administratif yang panjang, meliputi konsultasi publik, evaluasi provinsi, dan persetujuan bersama DPRD. Peraturan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap sektor pemerintahan beroperasi dengan mekanisme yang jelas dan terarah.

d. Tantangan Administratif Pasca Desentralisasi

Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, beban anggaran untuk perluasan birokrasi, koordinasi antar departemen, dan pembangunan yang tidak merata antar wilayah, terutama dengan percepatan pembangunan yang terpusat di Pangkalan Kerinci.

KESIMPULAN

Pembentukan Kabupaten Pelalawan pada tahun 1999 merupakan hasil perjuangan kolektif masyarakat Kampar Bagian Hilir yang didorong oleh aspirasi nyata untuk mempercepat pembangunan, memperkuat identitas lokal, dan meningkatkan pelayanan publik. Pemekaran daerah ini membawa dampak multidimensi yang signifikan secara sosial, ekonomi, dan administratif. Dampak sosialnya adalah munculnya identitas lokal baru dan rasa kebersamaan, namun juga menimbulkan kekacauan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta konflik sosial terkait sumber daya alam. Dari sisi ekonomi, Kabupaten Pelalawan tumbuh dengan basis sektor primer terutama perkebunan dan kehutanan, didukung investasi besar, namun menghadapi tantangan pemerataan pembangunan. Secara administratif, pemekaran ini mengakibatkan reorganisasi wilayah, pembentukan struktur birokrasi yang baru, serta sistem pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih mandiri, meskipun menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga.

Secara keseluruhan, pembentukan Kabupaten Pelalawan bukan sekedar perubahan administratif, melainkan proses transformasi sosial-ekonomi yang kompleks yang mempengaruhi dinamika masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah secara menyeluruh. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan integratif dalam memahami dampak pemekaran daerah di Indonesia. Kesimpulan ini menggambarkan perubahan mendasar dan



tantangan yang dihadapi Kabupaten Pelalawan sejak berdirinya hingga saat ini, serta peran penting partisipasi masyarakat dan investasi dalam menggerakkan pembangunan daerah.

SARAN

Peneliti menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Pelalawan ke depan memprioritaskan pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan khususnya Pangkalan Kerinci sebagai pusat pemerintahan dan daerah pedesaan yang masih tertinggal. Ketergantungan ekonomi pada sektor korporasi besar, terutama perkebunan kelapa sawit dan industri kehutanan, perlu dikurangi dengan mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Di sisi birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan koordinasi antarinstansi mutlak diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Selain itu, nilai-nilai adat dan budaya lokal mesti terus direvitalisasi, tidak hanya sebagai simbol identitas, tetapi juga sebagai fondasi pengembangan kekuatan sosial dan ekonomi berbasis komunitas. Untuk mencapai semua itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang integratif menggabungkan secara sinergis dimensi sosial, ekonomi, dan administratif sehingga otonomi daerah benar-benar membawa manfaat berupa peningkatan kesejahteraan yang adil, merata, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Pelalawan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Astuti, W., Hidayat, M., & Darwin, R. (2017). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 7(2). <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/download/252/156/376>
- Devi, A. S., Hotimah, K., A, R. S., Karimullah, A., & Anshori, M. I. (2024). Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas. *MASMAN: Jurnal Mahasiswa Manajemen*, 2(2), 66--78. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i2>
- Elfriani, T., Darsono, & Qonita, A. (2021). Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Penentuan Sektor Unggulan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2015-2019. *Agrista*, 9(2). <https://jurnal.uns.ac.id/agrista/article/viewFile/56540/33442>
- Fitriani, S. (2020). Perkembangan Kapasitas Administratif Pemerintahan Daerah Baru di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Pemerintahan Dan Desentralisasi*, 18(2), 90--107.
- Hasibuan, M. (2007). Dampak Administratif Pemekaran Daerah di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Andalas. <https://jurnal.unand.ac.id>
- Ismawati, D., & Resdati, R. (2025). Partisipasi Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Objek Wisata Bono di Kelurahan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2), 45--59. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/10881/9037>
- Kikon, P. (2021). Archival Research Method Analysis. *Journal of Advanced Research in Library and Information Science*, 8(1), 13--15.
- Lubis, A. F. (2012). Dampak Pemekaran terhadap Ekonomi Lokal di Riau. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Universitas Riau. <https://jurnal.unri.ac.id>



- Meiningrum, A. P. (2017). Kapasitas Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Pembangunan Kawasan Teknopolitan. *Neliti Journal of Public Administration*.
- Novera, L. (2005). Analisis Efektivitas Pemerintahan Baru Pasca Pemekaran Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 100--119.
- Simanjuntak, R. (2010). Evaluasi Pemekaran Daerah di Indonesia: Dampak Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Siregar, R. H. (2015). Transformasi Sosial Masyarakat Melayu Pasca Pemekaran Daerah. *Jurnal Antropologi Indonesia*, FIB UI. <https://journal.ui.ac.i>
- Sujianto, S. (2022). Pengembangan Modal Sosial dalam Penanggulangan Daerah Tertinggal di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 120--138. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2963574&val=26402>
- Usman, J. (2016). Peranan PDRB sebagai Alat Ukur Keberhasilan Pembangunan Ekonomi di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 200--210.
- Yohana, N., & Always, B. (2017). Konstruksi Sosial Masyarakat Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atas Realitas Bono. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 55--70. <https://www.neliti.com/publications/33270>

Buku

- Effendy, T. (1987). *Dari Pekantua ke Pelalawan: Lintasan sejarah Kerajaan Pelalawan*. Pekanbaru.
- Effendy, T., & dkk. (2005). *Lintasan sejarah Pelalawan (dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan)*. Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
- Effendy, T., & Jabbar, F. M. A. (2003). *Selayang pandang Bandara Khusus "Sultan Syarif Haroen Setia Negara" & sejarah perjuangan rakyat Pelalawan (dalam mempertahankan kemerdekaan RI)*. Public Relations-SLS PT Riaupulp dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
- Swastiwi, A. W. (2011). *Pelalawan: Dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan*. Tanjung. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang.

Arsip

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan. (1999). <https://peraturan.bpk.go.id>

Laporan / Prosiding / Karya Ilmiah

- Agus, P. F., Syapsan, & Hamidi, W. (2015). Analisis Pengaruh Investasi dan Ketenagakerjaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Kabupaten Pelalawan. <https://media.neliti.com/media/publications/129067-ID-analisis-pengaruh-investasi-dan-ketenaga.pdf>
- Arisca, T. I. S. (2019). Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Terhadap Perkembangan Wilayah di Kabupaten Pelalawan. <https://repository.uir.ac.id/8734/1/143410354.pdf>
- Fitri, A. (2006). Studi Komparatif Perkembangan Wilayah Pemekaran Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Universitas Gadjah Mada.
- Manalu, S. B. (2018). Studi Dampak Keberadaan PT. In Gandaerah Hendana terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Kasus Desa Ukui II. <https://repository.uir.ac.id/1883/1/154210280.pdf>



- Maulidana, M. H. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam Upaya Pengembangan Potensi Wilayah. Repository UIN Suska Riau.
- Pelalawan, P. K. (2020). Profil Kabupaten Pelalawan. Pemkab Pelalawan.